

KEMENANGAN PARTAI DEMOKRAT DAN MASA DEPAN PERANG GLOBAL MELAWAN TERORISME¹

Oleh :

Yanyan Mochamad Yani Ph.D.²

I. Terorisme

Pengkajian tentang terorisme kembali menarik perhatian dunia internasional setelah pada tanggal 11 September 2001 tiga pesawat penerbangan komersil Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Center* (WTC) dan gedung Pentagon. Peristiwa ini dikenal masyarakat internasional sebagai tragedi 911. Kejadian 911 ini pula telah menjadi *starting point* (titik anjak) masyarakat dunia yang dipimpin negara Amerika Serikat untuk mendeklarasikan perang global melawan terorisme (*global war against terrorism*).

Dewasa ini pemaknaan pengertian umum mengenai terorisme dapat merujuk pada pemaknaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

“Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby—in contrast to assassination—the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat—and violence—based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a

¹ Disampaikan pada acara Forum Diskusi Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, 16 Nopember 2006.

² Dosen Senior di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought".³

Dari definisi di atas terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi unsur definisi terorisme, yaitu Motif Politik, Rencana atau Niat, dan Penggunaan Kekerasan. Jika dicermati definisi terorisme ini, maka dapat dilihat bahwa definisi ini hanya melihat dari sisi aksi kekerasan atau *violent action* dari terorisme. Hal ini dapat diartikan bahwa jika sebuah tindakan yang tidak memakai aksi kekerasan tetapi mempunyai efek yang sama, tidak masuk dalam definisi tersebut diatas.

Kegiatan terorisme dapat menjadi berskala internasional (terorisme internasional) apabila:

- Diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri.
- Dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah atau faksi dari lebih satu negara.
- Diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing.⁴

Setiap aksi terorisme memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda-beda tergantung pada kondisinya masing-masing. Tindakan terorisme dapat didasarkan pada dua motif umum, yaitu *objective driven act* dan *terror driven act*.

Objective driven act berkaitan dengan tindakan terorisme yang didasarkan pada beberapa permintaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Cara yang biasa digunakan yakni melalui penyanderaan. Bentuk ini memberikan

³ <http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.htm>

⁴ Wilkinson, 1977: 174.

kesempatan kepada pemerintah untuk bernegosiasi atau mengubah kebijakannya. *Terror driven act* didasarkan pada tindakan balas dendam, atau digunakan juga sebagai peringatan atau ancaman kekerasan yang akan terjadi jika pemerintah tidak mengubah kebijakannya.⁵

Motif lain yang dewasa ini sedang banyak terjadi adalah didasarkan pada isu etnis, agama, kesenjangan sosial-ekonomi, dan perbedaan ideology yang terjadi dalam suatu masyarakat⁶ Sedangkan bentuk-bentuk terorisme internasional dapat berupa:

- *state-sponsored terrorism*, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, Amerika Serikat mengidentifikasi beberapa negara untuk hal ini seperti Kuba, Irak, Iran, Libya, Korea Utara, Syria.
- *privately-based terrorism*, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu kelompok terorisme privat, seperti Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan sebagainya.⁷

Pada dasarnya tindakan terorisme, dalam menentukan targetnya, memilih target-target yang potensial untuk menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran orang banyak. Sifat dari terorisme moderen adalah siap saja dapat menjadi korban. Tindakan terorisme ditujukan agar menarik perhatian banyak orang bahkan perhatian internasional dan menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional.

⁵ www.state.de.us/terrorism.htm

⁶ Henderson, 1998: 81-83.

⁷ Ibid, hal. 153-154.

Kemudian berkenaan dengan kewajiban setiap negara untuk memerangi terorisme, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang secara teori wajib untuk diikuti sebagai anggota dari PBB seperti yang tercantum dalam pasal 25 dari Piagam PBB yaitu *“The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the Present Charter”*. Salah satu resolusi DK PBB adalah resolusi nomor 1368 tanggal 12 September 2001 yang berisikan :

“Calls those state to work together urgently to bring justice the perpetrators, organizers and sponsors of these terrorist attacks and stresses that those responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held accountable”.

Dari sini dapat dilihat bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi universal berkenaan dengan terorisme. Secara teoritis setiap negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk memerangi terorisme dengan segala cara atau *by any means*. Hal itu dikarenakan kerugian yang disebabkan oleh terorisme adalah sangat besar baik secara finansial maupun nyawa. Dari sisi inilah kemudian dunia internasional mempunyai kepentingan bersama atau *common interests* untuk mengatasi permasalahan terorisme.

Kaitannya dengan terorisme, peristiwa tragis runtuhnya Menara Kembar Pusat Perdagangan Dunia (*World Trade Center/WTC*) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2001 merupakan titik awal bagi dimulainya perang global melawan terorisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat (baca: sekutu Amerika Serikat). Secara khusus, peristiwa 9/11 ini juga telah mengubah tatanan dunia dalam hubungan internasional.

Perubahan tatanan dunia pasca tragedi 9 September antara lain:

Pertama, membuka peluang di negara-negara besar seperti Cina, Rusia, AS, dan juga negara-negara Eropa, untuk lebih mempererat kerjasama mereka, terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Kedua, menunjukkan bahwa dunia sekarang betul-betul *borderless* (tanpa batas). Sebuah kejadian di New York, kemudian dapat memunculkan dampak luar biasa dan dirasakan di mana-mana.

Ketiga, penting pada level global, isu terorisme menjadi isu global satu-satunya (*the only gobal issue*) yang harus ditanggulangi secara bersama-sama oleh semua masyarakat internasional.

Lebih lanjut, bagi orang Amerika Serikat tragedi 9 September adalah sesuatu yang mengagetkan dikarenakan:

1. Sejarah perang AS. Perang yang diikuti AS tidak pernah dilakukan di wilayah AS sendiri.
2. AS juga tidak pernah mengalami sebuah peristiwa sedahsyat 11 September itu.
3. Opini publik AS dengan tumbangnya Uni Soviet – muncul perasaan bahwa AS tidak mungkin bisa diterobos oleh semua bentuk ancaman.
4. Peristiwa tragis 911 memunculkan semangat nasionalisme yang sangat tinggi di AS.
5. Kemudian juga memunculkan kemarahan luar biasa di AS, yang dalam hal ini dilampiaskan kepada kelompok Osama bin Ladin dan Taliban.

Sebagai reaksi atas tindakan teroris yang telah mengancurkan WTC para elit politik Amerika Serikat yang diwakili oleh Presiden Amerika Serikat, George Bush Jr menyatakan bahwa, "*This Crusade, this war on terrorism, is going to take a long time* (Perang salib ini, perang melawan terorisme , akan memakan waktu yang lama)."⁸ Kemudian Wakil menteri pertahanan urusan intelijen Letnan Jenderal William Boykin mengatakan: "*The U.S. battle with Islamic terrorists as a clash with the devil* (bahwa perang melawan teroris Islam sama dengan perang melawan setan)".⁹

II. Kebijakan-kebijakan Negara Barat Dalam Perang Global Melawan Terorisme

Secara umum, terdapat tiga strategi negara-negara Barat (yang dikomandoi oleh Amerika Serikat) dalam perang global melawan terorisme yaitu:

1. Penutupan dan penghancuran organisasi-organisasi teroris;
2. "Pertempuran ide (*the battle of ideas*)";
3. Keamanan dalam negeri.¹⁰

Kemudian negara-negara Barat juga memahami bahwa terdapat dua tahap perang terhadap terorisme yaitu:

Pertama, sebelum peristiwa 911 sebagai *law enforcement issues* (contoh: Kasus Lockerbie, Skotlandia dibom Teroris Libia dan Resolusi 1267 Dewan Kemanan PBB yang memasukan semua entitas yang berkaitan dengan jaringan Al Qaeda). Strategi yang diterapkan As dan sekutunya yakni *Defensive strategy*.

⁸ BBC, 16 September 2001.

⁹ Voice of America, 22 oktober 2003.

¹⁰ Douglas J. Feith , "US Strategy in the Global War against Terrorism", Under Secretary of Defense for Policy, Department of Defense of USA, 7 Februari 2003.

Kedua, setelah adanya peristiwa 911 sebagai *act of War* yang memicu *global war against terrorism*. Strategi yang diterapkan AS dan sekutunya yakni *pre-emptive strikes*.

Namun, sayangnya AS dan sekutunya tidak secara pasti menyatakan kriteria kapan dan bagaimana perang global melawan terorisme tersebut akan berakhir, seperti yang tersurat dalam pernyataan:

*“The global war on terrorism is complex and novel, radically different from warfare against conventional enemies in the form of states with regular armed forces. US strategy is adapting to the challenge”.*¹¹

III. What Can We Learn?

- Terorisme telah menjadi *driving force of the US foreign policy* menggantikan komunisme
- Dalam jangka panjang Amerika Serikat ingin sekali mengakhiri tirani di seluruh dunia dengan penegakkan demokrasi ala Amerika Serikat
- Perang global melawan terorisme adalah perang semesta yang batasan raihan kemenangan dan akhir masa perang belum secara pasti dinyatakan oleh Amerika Serikat
- Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu target utama dalam perang global melawan terorisme ala Amerika Serikat.

IV. What Should We Do?

Ancaman terorisme di Indonesia juga menjadi ancaman riil. Indonesia juga rawan aksi-aksi terorisme, buktinya beberapa kali kasus peledakan bom terjadi.

¹¹ Ibid.

Persoalannya bagaimana pemerintah bisa independen, bergerak secara decisive (tegas), tanpa ada tekanan dari luar. Namun, nyatanya tidak. Pemerintah baru membuat desk antiteror dan peraturan perundang-undangan antiteror setelah peledakan bom Bali. Dengan demikian, pemerintah seolah sangat reaktif, baik terhadap peristiwa maupun terhadap tekanan luar.

Karena itu, Indonesia harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan antisipasi terhadap upaya perang global melawan terorisme ala Amerika Serikat dengan melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia.

V. Quo Vadis Partai Demokrat dalam Perang Global Melawan Terorisme?

Pola baru pemberantasan terorisme mungkin akan dilakukan AS. Tampilnya Partai Demokrat yang mengedepankan humanisme dalam politik luar negeri AS akan membuka peluang implementasi yang lebih dari strategi kedua *battle of ideas* dibandingkan penggelaran kekuatan militer ofensif. Perang ide melawan terorisme lebih halus dilakukan, tetapi hasilnya dapat lebih ampuh daripada pengerahan kekuatan militer. Teknik perang ide ini, misalnya saja “pencucian otak” secara tidak langsung akan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh suatu bangsa. Secara perlahan tapi pasti pada akhirnya bangsa tersebut akan kehilangan roh kebangsaannya (baca: jatidirinya). Cara yang digunakan, misalnya kampanye melalui media elektronik maupun media cetak.

Khusus, kaitannya dengan perang AS melawan terorisme, maka diharapkan pemikiran dan atau paham yang secara sosiologis selama ini diperjuangkan oleh para teroris dan dianut oleh masyarakat setempat secara perlahan akan

pupus dan secara tidak langsung pada akhirnya nanti kehidupan bangsa tersebut akan didominasi oleh konsep nilai-nilai demokrasi ala AS.

Apabila hal itu terjadi, berarti ke depan dimensi sosial dari hubungan bilateral AS-Indonesia akan lebih mengemuka dan turut mempengaruhi hubungan antar pemerintah kedua negara. Bagaimanapun kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu terorisme global akan mencerminkan tarik menarik antara komitmen terhadap keamanan internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan keniscayaan politik untuk mengakomodasi aspirasi konstituen-konstituen dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BBC, 16 September 2001.

Douglas J. Feith , “US Strategy in the Global War against Terrorism”, Under Secretary of Defense for Policy, Department of Defense of USA, 7 Februari 2003.

Henderson, Conway W. 1998. *International Relations: Conflict and Cooperation at the Turn of 21st Century*. New York: McGraw-Hill International.

<http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.htm>

Voice of America, 22 oktober 2003.

Wilkinson, Paul. 1977. *Terrorism and the Liberal State*. New York: The Macmillan Press Ltd.

www.state.de.us/terrorism.htm